

BAB I

PENGERTIAN PEMBINAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1.1. Konsep Pembinaan

Indonesia merupakan Negara yang cukup luas dan beraneka ragam baik dari suku, ras, agama, maupun budaya. Tindakan yang memicu kericuhan, biasanya juga didorong oleh faktor ekonomi dan penduduk yang heterogen. Salah satu tujuan dari negara NKRI, yang tertera pada alenia ke-4 Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni "... melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,..." bermakna secara tersirat bahwa begitu penting suatu ketertiban di Negara Indonesia sehingga untuk mempertahankan ketertiban yang dimaksud maka perlu dilaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.

Tujuan mulia di atas dapat tercapai dengan memahami makna disetiap katanya sehingga makna yang sudah tertanam dalam jiwa akan mudah tumbuh, mengalir ke pembuluh darah dan dapat dengan mudah kita merealisasikannya. Pertama kita perlu memahami bagaimana sebenarnya makna dari kata pembinaan, dimana pembinaan berasal dari kata "bina", berikut adalah pengertian pembinaan menurut beberapa ahli;

1. Pembinaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan membina (negara dsb) atau merupakan

tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

2. Dalam Buku Pembinaan Militer Departemen HANKAM disebutkan,

"Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya". (Musaneff, 1991:11).

3. Sementara Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul "Pembinaan Organisasi" mendefinisikan, pengertian pembinaan bahwa :

- a. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik.
- b. Pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan (change).
- c. Pembinaan merupakan suatu pernyataan yang normatif, yakni menjelaskan bagaimana perubahan dan pembaharuan yang berencana serta pelaksanaannya.
- d. Pembinaan berusaha untuk mencapai efektivitas, efisiensi dalam suatu perubahan dan pembaharuan yang dilakukan tanpa mengenal berhenti. (Miftah, 1997:16-17).

Masih banyak lagi pengertian pembinaan dari berbagai sumber namun dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu proses perubahan dimana terdapat subjek maupun objek yang berperan untuk mencapai suatu tujuan dengan cara yang efektif dan efisien.

Secara konseptual, pembinaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata 'power' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan

kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Kaitannya dalam hal ini, pembinaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok masyarakat untuk dapat mengendalikan rutinitas sehari-hari dengan disiplin dan memperhatikan kenyamanan dan ketertiban lingkungan sehingga kesadaran masing-masing individu sangat membantu. Oleh sebab itu, yang dibina bukan hanya sekedar hal-hal fisik saja namun yang lebih utama adalah perubahan mindset masyarakat untuk lebih sadar diri dan berubah menaati segala aturan yang berlaku.

Pelaksanaan dari konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal yang bersifat efektif dan pragmatis; bersifat efektif dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena dapat diterapkan dalam praktek.

Komponen-komponen berkualitas dalam proses diperlukan untuk mencapai tujuan. Jika kita membuat perumpamaan, dalam suatu persentase proses dari angka 0% menjadi 40% dan dari 40% menjadi 100%. Ketika telah mencapai titik puncak pun pembinaan masih diperlukan, karena angka 100% hanya murni secara pembulatan, dalam kehidupan realita adalah 99,9%. Tindak kejahatan, kriminal, ataupun ketidakpatuhan terhadap aturan masih saja sering terjadi, sehingga selalu diperlukan adanya pembinaan.

Tidak tercapainya apa yang diharapkan akan sangat mempengaruhi kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal. Adanya peran pembinaan ini sangat diperlukan guna mengarahkan setiap orang pada aturan yang telah ditetapkan dan menaatinya, baik dengan cara halus maupun keras. Sehingga masyarakat akan menjadi masyarakat madani, kebiasaan tertib dan taat aturan akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tingkah laku masyarakat.

Hal yang perlu disadari dalam pembinaan, diperlukan pandangan yang berbeda terhadap setiap individu dari usia muda hingga tua bahwa setiap individu memiliki kemampuan mobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pembinaan memberi kerangka acuan mengenai kekuasaan (power) dan kemampuan (kapabilitas) yang melingkup arah sosial, ekonomi, budaya, politik dan kelembagaan.

Terdapat aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pembinaan, aktivitas pembinaan yang mengandung unsur-unsur mempertahankan, menyempurnakan dan pembaharuan dengan sifat-sifat dinamik, progresif, dan inovatif dapat berjalan dengan baik bila dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Merrill (1981:217) bahwa pembinaan merupakan suatu usaha yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan tertentu agar pengetahuan, sikap dan keterampilan sasaran pembinaan (subyek) dapat meningkat.

Menurut Sumodiningrat, Pembinaan tidak selamanya, melainkan dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat

dari pendapat tersebut berarti pembinaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Sebagaimana disampaikan di muka bahwa proses belajar dalam rangka pembinaan akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap Transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap Peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemadiran.

Menurut Keiffer (1981), pembinaan yang dilakukan kemudian mencakup tiga hal pokok yakni kerakyatan, kemampuan sosial politik, dan berkompetensi partisipatif (Suharto,1997:215). Parson et.al (1994:106) juga mengajukan tiga dimensi dalam pelaksanaan pembinaan tersebut yang merujuk pada :

1. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
2. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.
3. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur yang masih menekan.

Lebih lanjut Sedarmayanti menjelaskan, kata pembinaan (empowerment) mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh.

Proses pembinaan mengandung dua kecenderungan yaitu :

1. Kecenderungan Primer, proses pembinaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya (*survival of the fittes*) proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi.
2. Kecenderungan sekunder, menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan/keberdayaan untuk menentukan yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dari dua kecenderungan di atas memang selain mempengaruhi dimana agar kecenderungan primer dapat terwujud maka harus lebih sering melalui kecenderungan sekunder. Selanjutnya Tikson dalam Sani (2000) menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam proses pembinaan masyarakat yaitu :

1. Pengorganisasian Masyarakat

Bidang ini berkenaan dengan peningkatan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan secara efektif melalui pengorganisasian. Masyarakat dapat diorganisasikan ke dalam beberapa bentuk, seperti organisasi kewilayahan yang luas, organisasi sektoral dan jaringannya atau aliansi dan koalisi. Organisasi-organisasi ini merupakan alat masyarakat untuk menyatakan kehendak mereka dan untuk mempengaruhi proses perubahan yang diinginkan.

2. Penguatan Kelembagaan

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan penguatan kemampuan organisasi yang telah ada dengan meningkatkan unsur : pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang ada termasuk didalamnya proses perguliran, manajemen, kemandirian kelompok, norma, dan nilai yang

dianut organisasi agar kegiatan kolektif menjadi lebih efektif dan efisien. Penguatan kelembagaan dalam penerapannya banyak dilakukan melalui pelatihan, keterampilan dan studi banding. Keterampilan ini mencakup latihan kepemimpinan, penerapan organisasi dan manajemen keuangan, studi banding dilakukan untuk melihat kelompok di tempat lain yang telah berhasil meningkatkan produktivitas kerja organisasi.

3. Manajemen Sumber Daya

Kegiatan ini untuk menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan apabila mereka mampu mengelola sumber daya dengan baik, termasuk didalamnya adalah kegiatan-kegiatan pengembangan organisasi sosial yang dapat melakukan fungsi pelayanan sosial, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, transportasi, dan kegiatan lain yang dianggap perlu. Di samping itu organisasi ekonomi diperlukan untuk memformulasikan berbagai kegiatan ekonomi yang ada menjadi lebih beragam dan luas sehingga dapat memperluas lapangan kerja. Kegiatan konservasi dan rehabilitas lingkungan demi terciptanya pembangunan ekologi dan ekosistem juga menjadi perhatian.

Menurut Parson et.al (1994:112-113) menyatakan bahwa proses pembinaan umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur yang menyatakan bahwa proses pembinaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien (masyarakat) dalam setting pertolongan perseorangan. Dalam konteks pekerjaan sosial pembinaan dapat dilakukan melalui :

1. Asas Mikro, pembinaan melalui bimbingan tujuannya membimbing atau melatih masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan. Model yang sering disebut pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
2. Asas Mezzo, pembinaan dilakukan pada sekelompok klien (masyarakat), metode ini dilakukan dengan menggunakan kelompok, media intervensi, tujuan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menghadapi permasalahan.
3. Asas Makro, pendekatan sistem besar (*large system strategy*) perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik. Metode ini memandang klien sebagai orang memiliki kompetensi.

Materi yang diperlukan dalam pembinaan mencakup pengaturan sumber-sumber yang diperlukan, antara lain : pegawai, biaya (*money*), peralatan (*equipment*), bahan-bahan/perlengkapan (*material*), waktu yang diperlukan (*time will be needs*), hal tersebut harus sudah tersedia bila diperlukan.

Materi pembinaan yang meliputi bagaimana mengalokasikan pelaksanaan dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan prosedur pengambilan keputusan dan cara-cara mengorganisasikannya, sehingga bahan-bahan pembinaan tersebut dapat diinformasikan dalam pelaksanaannya. Materi pembinaan sangat diperlukan dalam persiapannya baik dalam bentuk standar atau formulir yang dapat digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang penting daripada kegiatan tersebut. Menurut pendapat Soewarno Handyaningrat dalam bukunya yang berjudul Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen menjelaskan pengertian Materi, bahwa:

"Materi adalah merupakan bentuk standar atau formulir lisan yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal penting yang dipraktekkan harus dengan jelas dan teliti, yang merupakan catatan informasi dalam bentuk standar yang penyampaiannya diatur secara rapi sebagai dokumen informasi". (Soewarno,1994:133).

Materi merupakan suatu sumber nilai dan merupakan sumber data setelah diolah menjadi sumber informasi yang kemudian diatur, dinilai, sehingga mudah untuk dijadikan bahan dalam suatu kegiatan. Selanjutnya diperlukan adanya sistem pencatatan informasi dan penyimpanan (*filling and record system*) yang sewaktu-waktu dapat digunakan dalam suatu kegiatan berikutnya.

1.2. Pengertian Ketenteraman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) **ke·ten·te·ram·ann**¹ keadaan tenteram; keamanan; **2** ketenangan (hati, pikiran). Ketenteraman secara umum dapat didefinisikan sebagai suasana batin dari individu dan/atau masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan dan keinginan sesuai norma-norma. Suasana batin yang terpenuhi bisa disebabkan karena pikiran tak terpenuhi atau terganggu oleh kejahatan di lingkungan sekitar ataupun kericuhan yang terjadi. Kesibukan pikiran untuk meng andai- andai keburukan yang akan dialaminya menjadi pemicu stress dan menyebabkan hati tidak tenang. Pada dasarnya jika masing- masing individu sudah terhindar dari kegelisahan maka saat itulah individu tersebut sedang merasakan ketenteraman.

Jika kita membahas tentang Indonesia, apakah sampai saat ini Indonesia bisa dikatakan sebagai Negara yang masyarakatnya sudah

merasakan ketenteraman? Rasa tenteram akan tumbuh dengan sendirinya jika keamanan tetap stabil. Berdasarkan berita di www.cnnindonesia.com, Indonesia disebut sebagai Negara paling pesat peningkatannya di Asia dalam hal keamanan. Dimana ranking Indonesia naik dari yang awalnya menempati posisi ke-54 pada tahun 2014 menjadi posisi ke-46 di tahun 2015. Di tingkat Asia, Indonesia menempati posisi ke 10, setelah Selandia Baru, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, Taiwan, Laos, Korea Selatan, dan Mongolia. Naiknya ranking yang berhasil diperoleh Indonesia disebabkan karena adanya penurunan tingkat kekerasan dan terorisme. Hal ini sedikit berbeda dengan kenyataan di lapangan. Jika angka 46 menjadi cover sekarang lalu dari bagian manakah yang dapat membuktikan peningkatan tersebut? Sedangkan tidak jarang kita dapati kasus begal ataupun terorisme yang sempat menjadi *timeline* dari media satu sampai media lainnya, bahkan sampai dengan makanan yang kita konsumsi sehari-hari pun menjadi setengah asli, bukan setengah dewa. Begitu banyak berita yang cukup mencengangkan dan menjadi *trend* di tahun 2015 ini. Lalu apakah makna sebenarnya ketenteraman sendiri bagi Negara yang amat kaya raya ini? Apakah dengan berlanjutnya kontrak pengerukan emas di pulau ujung timur Indonesia? Ataupun dengan sibuknya golongan atas memperebutkan tanda pangkat dengan bertengger di atas keringat rakyat? Makna tenteram menjadi sangat luas jika kita melihat dari segala aspek. Seperti yang kita ketahui sistem ABS (Asal Bapak Senang), tentu

karyawan akan mengatakan semuanya baik-baik saja, menutupi kekacauan dengan segala cara tanpa melihat apa yang telah dikorbankan. Memang tenteram, namun hati bapak lah yang sebenarnya tenteram. Sementara ketenteraman lingkungan dan masyarakat sekitar harus terkorbankan. Pada dasarnya ketenteraman dapat dirasakan jika kelompok individu mampu menjaga ketertiban umum, sehingga kerancuan akan makna ketenteramaan dapat dicegah.

1.3. Pengertian Ketertiban Umum

Manusia merupakan makhluk sosial, hidup berkelompok dan saling tergantung satu sama lain. Perilaku antara individu satu terhadap individu lainnya sangat berpengaruh, baik pengaruh yang bersifat positif maupun negatif. Kehidupan yang tertib dapat membantu manusia untuk menghindari pengaruh yang buruk. Sangatlah penting bagi setiap individu untuk menjaga ketertiban umum dalam menciptakan kehidupan yang harmonis. Ketertiban berasal dari kata tertib dimana terdapat suatu keadaan yang sesuai dan teratur baik. Ketertiban berarti aturan yang telah disepakati berjalan dengan baik dan lancar, sehingga tidak diperlukan lagi petugas maupun pengawas. Salah satu penyebab pentingnya ketertiban dapat dilaksanakan adalah diperlukan adanya kepatuhan. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Maka masyarakat harus mempertahankan tatanan yang ada. Ketertiban dapat membuat masyarakat disiplin. Seperti kata pepatah,

“Disiplin tidak menjamin keberhasilan, tapi tidak ada keberhasilan tanpa disiplin”. Jika masyarakat disiplin dan mampu mengontrol diri maka dengan mudah ketertiban akan tercipta dan sedikit demi sedikit Negara Indonesia mampu maju dan mengejar segala ketertinggalan. Dengan ketertiban seseorang berusaha mengetahui dan mencermati aturan agar perjalanan menjadi lebih lancar. Ketertiban adakalanya disamakan dengan ketertiban umum, dimana dalam buku “Pengantar Hukum Perdata Internasioanal Indonesia” Prof. Drs. Gautama mengibaratkan lembaga ketertiban umum ini sebagai “rem darurat” yang kita ketemukan pada setiap kereta api. Harus dipakai dengan hati hati, jika terlalu lekas menarik rem, maka “Kereta HPI” tak dapat berjalan dengan baik.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja “Ketertiban ” adalah tujuan pokok dan utama dari segala hukum, kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur, ketertiban sebagai suatu tujuan hukum, merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat, manusia dalam segala bentuknya untuk mencapai ketertiban ini diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat.

1.4. Pengertian Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Telah kita ketahui bagaimana pengertian pembinaan, ketenteraman, dan ketertiban umum. Dimana ketertiban merupakan keadaan yang serba teratur dengan prinsip, kesopanan, kedisiplinan dengan maksud untuk mencapai suatu yang diinginkan bersama yakni

terciptanya suasana yang tenteram dan damai. Untuk menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum tersebut maka perlu dilakukan pembinaan. Pembinaan adalah upaya untuk mendorong dan memotivasi sumber daya yang dimiliki serta berupaya mengembangkan dan memperkuat potensi tersebut yaitu penguatan individu dan organisasi dengan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki. Jadi pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum ialah upaya untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum dengan melibatkan lembaga keamanan negara maupun pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat.

Gangguan Keamanan dan Ketertiban sangat meresahkan masyarakat atas perilaku seseorang yang bertindak tidak baik, di bawah ini contoh-contoh permasalahan yang terkadang terjadi pada lingkungan masyarakat sekitar :

1. Konflik Sara
2. Perkelahian
3. Pencurian dan Perampokan
4. Perjudian
5. Anak korban kekerasan
6. Pencurian motor
7. Kasus Narkoba
8. Pembunuhan
9. Prostitusi
10. Kejahatan seksual dan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
11. Penculikan
12. Penipuan
13. Kebakaran
14. Kebanjiran
15. Gangguan lain-lain

Dengan banyak gangguan keamanan di berbagai tempat, timbul wacana agar keamanan juga dimasukkan ke dalam kategori kebutuhan dasar masyarakat.

Diberlakukannya ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR-RI/2000 dan ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR-RI/2000 telah terjadi pembagian fungsi secara jelas dalam fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu sebagai berikut :

1. Tugas pokok TNI adalah dalam bidang pertahanan dan dalam pelaksanaan tugasnya dapat memberikan tugas bantuan kepada POLRI dalam menjalankan tugas keamanan;
2. Tugas pokok POLRI adalah dalam bidang keamanan dan ketertiban (KAMTIB) .

Adapun pembagian peran antar TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban yaitu:

1) Peran TNI.

a. Alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan NKRI

b. Menjalankan tugas bantuan :

- Penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan (*civil mission*)
- Bantuan kepada polri dalam rangka tugas keamanan atas pemerintah.

2) Peran POLRI.

- a. Alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. POLRI menjalankan tugas bantuan :
 - Dalam keadaan darurat kepada TNI
 - Penanggulangan kejahatan internasional
 - Pemeliharaan perdamaian dunia dibawah bendera PBB.

1.5. Peran Pemerintah Daerah

Dimanifestasikan melalui tugas kepala Daerah pasal 65 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yakni "Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat". Bidang pertahanan dan keamanan serta bidang keamanan dan ketertiban dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan keamanan (*security approach*), sedangkan bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban yang menggunakan pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Mengingat bahwa ketenteraman dan ketertiban merupakan suatu kebutuhan dasar individu dan atau masyarakat, sudah selayaknya apabila ada partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga partisipasi dari masyarakat tersebut dapat tersalur secara tepat, dan perlu dibangun suatu mekanisme.

Pada masa UU Nomor 5 tahun 1974 maupun UU sebelumnya, pembinaan ketenteraman dan ketertiban menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang pelaksanaannya didelegasikan kepada kepala wilayah (gubernur, bupati, walikotamadya, walikota, camat) dalam rangka dekonsentrasi. Pada masa UU Nomor 32 tahun 2004, pembinaan ketenteraman dan ketertiban tidak hanya didelegasikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, tetapi justru menjadi kewajiban kepala daerah (propinsi, kabupaten/kota) dan wakil kepala daerah walaupun tugas wakil kepala daerah untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat tidak disebutkan secara langsung. Begitu juga dengan UU No. 9 Tahun 2015. Dalam hal ketertiban umum, pemerintah daerah mempunyai kewajiban menegakkan peraturan daerah melalui perangkat daerahnya. Apabila dipandang perlu, Polri akan membantu pemerintah daerah. Sedangkan Polri menegakan semua peraturan perundang-undangan baik yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Apabila diperlukan, perangkat pemerintah daerah yang bertugas di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban dapat diminta membantu pihak Polri. Partisipasi masyarakat memerlukan prasyarat yakni adanya kesukarelaan, adanya keterlibatan emosional serta adanya manfaat baik langsung maupun tidak langsung dari keterlibatannya. Partisipasi masyarakat akan muncul apabila mereka mengetahui, serta memahami

mengenai hal-hal yang akan dijalankannya. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan;
- 2) Memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan, baik pada tahap penyusunan kebijakan, tahap implementasi maupun tahap evaluasinya;
- 3) Membahas bersama mengenai pelaksanaan kegiatan, baik keberhasilan maupun keagalannya secara terbuka.

Dalam rangka menstimulasi masyarakat agar mau berpartisipasi dalam bidang ketenteraman dan ketertiban, diperlukan adanya rasa saling percaya (*trust*) antara pemerintah dengan masyarakat serta antarmasyarakat. Tanpa adanya saling percaya, justru akan timbul rasa saling curiga, sehingga akan mudah dihasut. Pada sisi lain juga diperlukan peran, pembagian peran serta tanggung jawab disertai dengan hubungan yang jelas diantara para entitas (masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pemerintah desa). Pembagian peran masing-masing entitas dalam kegiatan ketenteraman dan ketertiban dapat disederhanakan sebagai berikut :

1. Pemerintah pusat.

- a. Membuat kebijakan secara makro berkaitan dengan penciptaan situasi dan kondisi bagi terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban;
- b. Menyediakan anggaran guna mendukung pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- c. Menciptakan mekanisme hubungan kerja antar entitas secara makro;
- d. Menegakan aturan yang berlaku secara nasional;
- e. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban berskala makro.